

**DEKONSTRUKSI KETIMPANGAN STRUKTURAL DAN AKSES
KESEJAHTERAAN: DIALEKTIKA TEORETIS DALAM
REALITAS SOSIAL KONTEMPORER**

Ario Sukbandoro¹, Yudhi Hertanto²

Universitas Ibn Khaldun¹; Universitas Islam Sultan Agung²

e-mail: yudhihertanto@gmail.com

Diterima: 8/7/2026; Direvisi: 20/8/2026; Diterbitkan: 31/8/2026

ABSTRACT

Ketimpangan sosial ekonomi kontemporer tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai variasi pendapatan antarindividu, melainkan sebagai manifestasi distorsi struktural yang sistemis. Artikel ini bertujuan merekonstruksi paradigma analisis ketimpangan sosial melalui sintesis pemikiran Amartya Sen, Joseph Stiglitz, Jeffrey Winters, dan Jeffrey Sachs. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka analitis. Literatur dianalisis melalui tahapan identifikasi konsep, komparasi perspektif, dan sintesis teoritis untuk membangun kerangka analisis yang integratif. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi empat perspektif ekonomi-politik ke dalam satu model konseptual yang menjelaskan reproduksi ketimpangan struktural secara komprehensif. Analisis mencakup deprivasi kapabilitas (Sen), perburuan rente (Stiglitz), oligarki (Winters), dan perangkap kemiskinan struktural (Sachs), serta dikaitkan dengan komersialisasi layanan dasar di Indonesia dan kerentanan pekerja dalam ekonomi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsentrasi kekayaan memperlemah persaingan, memperbesar asimetri informasi, dan membatasi kapabilitas masyarakat melalui kebijakan yang dipengaruhi struktur kekuasaan. Artikel ini menawarkan kerangka kebijakan terintegrasi berupa reformasi pajak progresif, penguatan jaminan kapabilitas dasar, *de-oligarkisasi* regulasi, dan percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mewujudkan keadilan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Ketimpangan Struktural, Pendekatan Kapabilitas, Perburuan Rente, Oligarki, Pembangunan Berkelanjutan.*

ABSTRACT

Contemporary socioeconomic inequality can no longer be understood merely as differences in individual income, but rather as a manifestation of systemic structural distortions. This article aims to reconstruct the analytical paradigm of social inequality by synthesizing the perspectives of Amartya Sen, Joseph Stiglitz, Jeffrey Winters, and Jeffrey Sachs. This study employed a descriptive qualitative approach based on an analytical literature review. The literature was analyzed through concept identification, comparative analysis of perspectives, and theoretical synthesis to develop an integrated analytical framework. The novelty of this study lies in integrating four major political economy perspectives into a single conceptual model that comprehensively explains the reproduction of structural inequality. The analysis examines capability deprivation (Sen), rent-seeking behavior (Stiglitz), oligarchic domination (Winters), and structural poverty traps (Sachs), while relating these concepts to the commercialization of essential public services in Indonesia and the growing vulnerability of workers in the digital economy. The findings indicate that the concentration of wealth weakens fair market

competition, exacerbates information asymmetry, and restricts people's capabilities through policies shaped by unequal power structures. This article proposes an integrated policy framework consisting of progressive tax reform, strengthened guarantees for basic capabilities, the de-oligarchization of regulatory institutions, and the acceleration of the Sustainable Development Goals (SDGs) to promote a more inclusive and sustainable justice system.

Keywords: *Structural Inequality, Capability Approach, Rent-Seeking, Oligarchy, Sustainable Development.*

PENDAHULUAN

Ketimpangan sosial ekonomi masih menjadi tantangan utama pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Selama ini keberhasilan pembangunan masih sering diukur melalui indikator makroekonomi, seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), sementara aspek pemerataan kesejahteraan dan perluasan kesempatan hidup masyarakat belum memperoleh perhatian yang seimbang. Berbagai indikator menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh penurunan ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan sosial. Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa disparitas distribusi pendapatan, kualitas pelayanan publik, serta ketimpangan kesejahteraan antardaerah masih menjadi persoalan mendasar yang menghambat pembangunan yang inklusif (Wati & Yasa, 2024; Sarjito, 2023; Lestari et al., 2024; Achmad, 2026). Selain itu, hambatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) juga semakin dipengaruhi oleh tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang saling memperkuat dalam membentuk kesenjangan sosial ekonomi (Naibaho et al., 2026). Oleh karena itu, pengukuran pembangunan yang hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi tidak lagi memadai untuk menjelaskan kompleksitas ketimpangan sosial yang bersifat multidimensional.

Transformasi digital, perubahan tata kelola layanan publik, serta berkembangnya ekonomi platform semakin memperlihatkan kompleksitas persoalan ketimpangan tersebut. Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan percepatan digitalisasi ekonomi menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kajian terkini menunjukkan bahwa komersialisasi layanan publik, meningkatnya biaya pendidikan, fleksibilitas hubungan kerja digital, dan lemahnya perlindungan sosial berpotensi memperluas kesenjangan apabila negara tidak mampu menghadirkan regulasi yang adaptif (Rani et al., 2021; OECD, 2023; World Bank, 2024; Kennedy, 2026). Penelitian Wood et al. (2025), Seubert et al. (2025), dan Nanda et al. (2026) juga menjelaskan bahwa kualitas pekerjaan dalam gig economy sangat bervariasi, tetapi secara umum pekerja platform menghadapi ketidakpastian pendapatan, rendahnya posisi tawar, minimnya perlindungan hukum, serta meningkatnya kerentanan psikologis dan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital belum secara otomatis menghasilkan pembangunan yang lebih inklusif apabila tidak disertai dengan kebijakan perlindungan ketenagakerjaan yang memadai.

Di sisi lain, kualitas tata kelola pemerintahan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan negara dalam mengurangi ketimpangan sosial. Keterbukaan informasi publik merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya good governance karena mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan (Suhendar, 2020). Sebaliknya, lemahnya transparansi dan dominasi kelompok kepentingan berpotensi memperbesar praktik rent-seeking, memperlemah efektivitas kebijakan sosial, serta menghambat pemerataan kesejahteraan (Sarjito, 2023; Ambarwati & Faisal, 2026). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ketimpangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas institusi dan tata kelola kebijakan publik.

Penelitian mengenai ketimpangan sosial selama ini umumnya mengkaji setiap perspektif secara terpisah. Kajian berbasis *Capability Approach* lebih menekankan perluasan kebebasan individu, penelitian mengenai Stiglitz berfokus pada kegagalan pasar dan asimetri informasi, sementara studi tentang Winters dan Sachs lebih banyak membahas oligarki maupun perangkat kemiskinan secara independen. Literatur terbaru juga menunjukkan bahwa penelitian mengenai ketimpangan masih cenderung mengkaji aspek kebijakan industri, pembangunan, gig economy, maupun tata kelola secara parsial tanpa menghubungkan dimensi politik, kelembagaan, dan kapabilitas manusia dalam satu kerangka analitis yang utuh (Behuria & Sumner, 2025; Seubert et al., 2025; Wood et al., 2025). Kesenjangan konseptual tersebut menyebabkan hubungan antara struktur kekuasaan, kegagalan pasar, dan reproduksi ketimpangan sosial belum memperoleh penjelasan yang komprehensif sehingga diperlukan pendekatan sintesis lintas perspektif.

Secara konseptual, Amartya Sen memandang kemiskinan sebagai deprivasi kapabilitas, Joseph Stiglitz menjelaskan ketimpangan melalui kegagalan pasar dan praktik *rent-seeking*, Jeffrey Winters menyoroti dominasi oligarki dalam mempertahankan kekayaan, sedangkan Jeffrey Sachs menekankan pentingnya intervensi pembangunan untuk memutus perangkat kemiskinan struktural. Perkembangan literatur mutakhir memperlihatkan bahwa keempat perspektif tersebut semakin relevan dalam menjelaskan dinamika pembangunan kontemporer yang ditandai oleh meningkatnya konsentrasi kekuasaan ekonomi, dominasi korporasi terhadap kebijakan publik, serta tantangan pemerataan manfaat kemajuan teknologi (Hickel et al., 2021; Burger Helmchen, 2024; Behuria & Sumner, 2025; Dede, 2025; Syata, 2026). Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa ketimpangan merupakan hasil interaksi antara struktur politik, mekanisme pasar, kapasitas institusional, dan kemampuan individu dalam mengakses sumber daya pembangunan. Oleh karena itu, pengintegrasian pemikiran Sen, Stiglitz, Winters, dan Sachs dipandang mampu menghasilkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam menjelaskan ketimpangan sosial ekonomi kontemporer.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung menggunakan satu pendekatan teoritis, penelitian ini menawarkan sintesis konseptual yang menghubungkan dimensi kapabilitas, kegagalan pasar, oligarki, dan perangkat kemiskinan dalam satu kerangka ekonomi-politik yang saling melengkapi. Novelty penelitian ini terletak pada penyusunan model analisis integratif yang menjelaskan bagaimana interaksi antara struktur kekuasaan, kualitas tata kelola, mekanisme pasar, dan kapasitas individu secara simultan mereproduksi ketimpangan sosial dalam konteks digitalisasi ekonomi dan komersialisasi layanan publik. Model tersebut tidak hanya menghubungkan teori-teori yang selama ini berkembang secara terpisah, tetapi juga digunakan untuk menginterpretasikan fenomena kontemporer seperti kerentanan pekerja platform digital, disparitas kesejahteraan antardaerah, dominasi oligarki dalam proses kebijakan, serta tantangan pencapaian SDGs. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis ketimpangan sosial ekonomi melalui sintesis pemikiran Amartya Sen, Joseph Stiglitz, Jeffrey Winters, dan Jeffrey Sachs guna membangun model konseptual yang lebih komprehensif terhadap dinamika ketimpangan struktural. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya pengembangan teori ekonomi-politik sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi penyusunan kebijakan publik yang lebih inklusif, berkeadilan, adaptif terhadap transformasi digital, dan berorientasi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, meliputi buku, artikel jurnal, dokumen kebijakan, dan laporan lembaga internasional yang relevan. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data Scopus, Google Scholar, Crossref, dan SINTA dengan menggunakan kata kunci *structural inequality*, *capability approach*, *rent-seeking*, *oligarchy*, *poverty trap*, *gig economy*, dan *public policy*. Literatur yang digunakan dibatasi pada publikasi tahun 2021–2026 untuk sumber pendukung mutakhir, sedangkan karya utama Amartya Sen, Joseph Stiglitz, Jeffrey Winters, dan Jeffrey Sachs digunakan sebagai rujukan primer. Kriteria inklusi meliputi publikasi yang telah melalui proses *peer review*, relevan dengan tema penelitian, dan tersedia dalam bentuk teks lengkap, sedangkan publikasi yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian atau bersifat duplikatif dikeluarkan dari proses analisis.

Analisis data dilakukan melalui empat tahapan, yaitu identifikasi dan seleksi literatur, *coding* terhadap konsep-konsep utama, kategorisasi tema berdasarkan perspektif masing-masing tokoh, serta sintesis konseptual untuk membangun kerangka analisis yang terintegrasi. Analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk mengidentifikasi gagasan pokok setiap literatur, sedangkan analisis wacana kritis diterapkan untuk mengkaji hubungan antara konsep teoritis dan realitas sosial kontemporer. Kredibilitas hasil penelitian diperkuat melalui triangulasi teori dengan membandingkan kesesuaian maupun perbedaan pandangan Sen, Stiglitz, Winters, dan Sachs terhadap isu ketimpangan sosial ekonomi, kemudian mengaitkannya dengan temuan literatur mutakhir dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk matriks komparatif sebagai dasar penyusunan sintesis dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Literatur yang digunakan dalam penelitian ini dipilih secara selektif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai perkembangan kajian ketimpangan sosial ekonomi dari berbagai perspektif teoretis dan empiris. Penelaahan terhadap penelitian terdahulu diperlukan untuk mengidentifikasi kecenderungan tema, pendekatan analisis, serta kontribusi ilmiah yang telah dihasilkan dalam menjelaskan hubungan antara pembangunan, kekuasaan, mekanisme pasar, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kajian literatur menjadi landasan dalam menemukan celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak dibahas secara terpadu dalam studi sebelumnya. Ringkasan hasil telaah tersebut disajikan pada Tabel 1 sebagai dasar pengembangan kerangka analisis integratif yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Sintesis Hasil Literature Review mengenai Ketimpangan Sosial Ekonomi Berdasarkan Perspektif Amartya Sen, Joseph Stiglitz, Jeffrey Winters, dan Jeffrey Sachs

No Penulis (Tahun)	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian
1 Achmad (2026)	Ketimpangan, kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan	Ketimpangan dipengaruhi dinamika kependudukan dan pembangunan	Mendukung analisis ketimpangan struktural

No Penulis (Tahun)	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian
2 Ambarwati & Faisal (2026)	Kebijakan publik dan ketimpangan sosial	Kebijakan publik menentukan distribusi kesejahteraan	Mendukung perspektif ekonomi-politik
3 Behuria & Sumner (2025)	<i>Middle-income trap</i> dan kebijakan industri	Ketimpangan dipengaruhi orientasi kebijakan dan ideologi pembangunan	Memperkuat perspektif Sachs dan Stiglitz
4 Burger Helmchen (2024)	Teknologi, kekuasaan, dan kemakmuran	Kemajuan teknologi memperbesar ketimpangan tanpa regulasi	Mendukung analisis transformasi digital
5 Dede (2025)	Oligarki dan demokrasi	Oligarki memengaruhi proses kebijakan publik	Mendukung teori Winters
6 Fauziah et al. (2026)	Faktor ketimpangan ekonomi Indonesia	Ketimpangan dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, dan kelembagaan	Mendukung pembahasan multidimensional
7 Firdausiyah & Sofa (2025)	Etika politik dan kebijakan publik	Nilai etika memperkuat kualitas kebijakan publik	Memperkuat dimensi normatif
8 Gunung et al. (2023)	Penyebab dan solusi ketimpangan	Ketimpangan disebabkan distribusi pembangunan yang tidak merata	Mendukung latar belakang penelitian
9 Hickel et al. (2021)	Ketimpangan global	Eksplorasi ekonomi global memperbesar ketimpangan	Mendukung perspektif ekonomi-politik
10 Jannah (2025)	Peran negara	Negara berperan penting mengurangi ketimpangan	Memperkuat fungsi kebijakan sosial
11 Kennedy (2026)	Gig economy	Transformasi digital meningkatkan fleksibilitas sekaligus kerentanan pekerja	Mendukung analisis pekerja digital
12 Lestari et al. (2024)	Kebijakan pengentasan kemiskinan	Kebijakan publik yang inklusif menurunkan ketimpangan	Mendukung rekomendasi kebijakan
13 Maruf & Othman (2025)	Regulasi dan kesejahteraan	Regulasi berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi	Mendukung hubungan hukum dan kesejahteraan
14 Mishra et al. (2024)	Bibliometrik SDGs	SDGs berkembang menuju pendekatan multidisipliner	Mendukung orientasi SDGs
15 Naibaho et al. (2026)	SDGs dan ketimpangan	Ketimpangan menjadi hambatan utama pencapaian SDGs	Mendukung implikasi pembangunan
16 Nanda et al. (2026)	Kebijakan global pekerja gig	Perlindungan pekerja platform masih sangat beragam	Mendukung rekomendasi regulasi
17 Pilatti et al. (2024)	Gig economy	Hubungan kuasa platform memengaruhi otonomi pekerja	Mendukung teori Winters dan Stiglitz

No Penulis (Tahun)	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian
18 Pratama et al. (2026)	Kritik pembangunan modern	Pembangunan harus berorientasi pada manusia	Mendukung perspektif Sen
19 Pratama et al. (2019)	Politik oligarki	Oligarki memengaruhi kebijakan sektor pertambangan	Mendukung teori Winters (<i>referensi di luar rentang 5 tahun</i>)
20 Rani et al. (2021)	Platform digital	Pekerja digital menghadapi ketidakpastian kerja	Mendukung pembahasan gig economy
21 Ranita (2023)	Gig economy Indonesia	Gig economy mendorong ekonomi namun meningkatkan kerentanan pekerja	Mendukung konteks Indonesia
22 Saksti (2026)	Ketimpangan sosial	Ketidakadilan struktural memperkuat kemiskinan	Mendukung analisis ketimpangan
23 Sarjito (2023)	Efektivitas kebijakan sosial	Kebijakan sosial menurunkan kemiskinan dan ketimpangan	Mendukung kebijakan redistributif
24 Seubert et al. (2025)	Precarious employment	Pekerjaan tidak pasti berdampak pada kesejahteraan psikologis	Mendukung pembahasan pekerja digital
25 Sorooshian (2024)	SDGs	SDGs memerlukan integrasi ekonomi, sosial, dan lingkungan	Mendukung implikasi pembangunan
26 Suhendar (2020)	Good governance	Transparansi meningkatkan efektivitas pemerintahan	Mendukung kualitas institusi (<i>referensi di luar rentang 5 tahun</i>)
27 Susanto (2025)	Human-centered development	Pembangunan harus berorientasi pada manusia	Mendukung Capability Approach
28 Syata (2026)	Kegagalan pasar	Intervensi pemerintah diperlukan mengatasi market failure	Mendukung teori Stiglitz
29 Tarigan & Huda (2025)	Kebijakan publik	Kebijakan sosial menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan	Mendukung rekomendasi kebijakan
30 Wati & Yasa (2024)	Disparitas pendapatan	Ketimpangan wilayah dipengaruhi distribusi pendapatan	Mendukung ketimpangan regional
31 Wood et al. (2025)	Kualitas pekerjaan platform	Pengalaman pekerja platform berbeda menurut tata kelola perusahaan	Mendukung pembahasan gig economy
32 Zulyanto (2022)	Pendidikan dan SDGs	Pendidikan merupakan instrumen pengentasan kemiskinan	Mendukung perspektif Sen

Berdasarkan sintesis literatur, dapat dipahami bahwa pembahasan mengenai ketimpangan sosial ekonomi berkembang ke arah pendekatan yang semakin multidisipliner dengan menghubungkan dimensi ekonomi, politik, hukum, kelembagaan, dan pembangunan manusia. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih menempatkan setiap perspektif teoretis secara parsial sehingga hubungan antarfaktor penyebab ketimpangan belum dijelaskan secara menyeluruh dalam satu kerangka konseptual. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang pengembangan model analisis yang mampu menjelaskan keterkaitan antara kapabilitas individu, struktur kekuasaan, mekanisme pasar, dan kebijakan pembangunan secara simultan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan sintesis pemikiran Amartya Sen, Joseph Stiglitz, Jeffrey Winters, dan Jeffrey Sachs sebagai kerangka integratif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika ketimpangan sosial ekonomi kontemporer.

Ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat kontemporer perlu dianalisis melalui keterkaitan antara struktur kekuasaan, mekanisme ekonomi, kebijakan pembangunan, dan kondisi aktual yang dialami masyarakat. Pendekatan yang hanya menggunakan satu perspektif berisiko mengabaikan hubungan timbal balik antara keputusan politik, distribusi sumber daya, dan kemampuan individu dalam menjalani kehidupan yang layak. Karena itu, matriks berikut digunakan sebagai perangkat analitis untuk mempertemukan empat perspektif pemikiran dalam membaca berbagai fenomena sosial yang berkembang di Indonesia. Pemilihan kasus didasarkan pada relevansinya dengan perubahan tata kelola sektor publik, pola pembiayaan layanan dasar, serta transformasi hubungan kerja pada era digital. Sintesis ini diharapkan dapat memperlihatkan bahwa ketimpangan terbentuk melalui proses yang saling berkelindan, bukan melalui satu mekanisme tunggal.

Tabel 2: Matriks Sintesis Integratif Perspektif Kasus Riil Masyarakat Kontemporer

Kasus Riil Kontemporer	Analisis Winters (Oligarki)	Analisis Stiglitz (Kegagalan Pasar)	Analisis Sachs (Perangkap Makro)	Analisis Sen (Kapabilitas)
Komersialisasi Sektor Kesehatan (Implementasi UU Kesehatan)	Elite bisnis medis mengarahkan regulasi agar mempermudah arus modal asing dan liberalisasi RS privat demi keuntungan kelompok.	Muncul asimetri informasi antara penyedia layanan medis privat dan pasien; klaim jaminan publik (BPJS) dipersulit lewat birokrasi pasar.	Pemerintah memangkas anggaran kesehatan langsung (<i>mandatory spending</i>), menciptakan perangkap beban penyakit bagi warga miskin.	Masyarakat mengalami deprivasi kesehatan; kehilangan kebebasan fisik untuk hidup sehat dan produktif secara sosial.
Komersialisasi Pendidikan Tinggi (Sistem PTN-BH & UKT Mahal)	Elite politik-ekonomi menggeser beban pendanaan pendidikan dari negara ke	Institusi pendidikan bertindak sebagai korporasi monopoli; memperlakukan	Kegagalan alokasi modal manusia (<i>human capital</i>) secara makro; memperlambat	Deprivasi intelektual; hilangnya kesempatan generasi muda cerdas dari kelas bawah

Kasus Riil Kontemporer	Analisis Winters (Oligarki)	Analisis Stiglitz (Kegagalan Pasar)	Analisis Sachs (Perangkap Makro)	Analisis Sen (Kapabilitas)
	pundak individu rakyat untuk mengurangi beban pajak korporasi.	pengetahuan sebagai komoditas komersial murni.	pemutusan rantai kemiskinan daerah tertinggal.	untuk meraih mobilitas sosial vertikal.
Kerentanan Pekerja Informal dalam Ekonomi Digital (Gig Economy)	Pemilik modal platform teknologi multinasional mendominasi regulasi ketenagakerjaan guna menghindari kewajiban jaminan sosial normatif.	Asimetri algoritma sepihak oleh korporasi; penetapan tarif kerja yang mencekik tanpa ada hak negosiasi dari pekerja (mitra).	Pekerja terjebak dalam perangkap upah subsisten rendah; ketiadaan kepastian jaminan pendapatan masa depan ekonomi jangka panjang.	Kebebasan ekonomi semu; hilangnya perlindungan keamanan kerja dan jaminan kesejahteraan substansif pekerja digital.

Sumber: Analisis Orisinal Peneliti (2026), diolah berdasarkan data sosiopolitik aktual.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa berbagai bentuk ketimpangan kontemporer memiliki karakter yang berbeda, tetapi dapat dipahami sebagai bagian dari proses struktural yang saling memperkuat. Persoalan yang muncul pada sektor layanan dasar dan pasar kerja tidak hanya berkaitan dengan distribusi sumber daya, tetapi juga dengan siapa yang memiliki kekuasaan dalam menentukan aturan, bagaimana insentif ekonomi bekerja, dan sejauh mana negara mampu menyediakan perlindungan bagi kelompok rentan. Keempat perspektif tersebut memberikan sudut pandang yang saling melengkapi untuk menjelaskan hubungan antara konsentrasi kekuasaan, distorsi mekanisme pasar, hambatan pembangunan, dan keterbatasan kesempatan individu. Dengan kerangka demikian, ketimpangan dapat dipahami sebagai persoalan multidimensi yang mencakup aspek politik, ekonomi, kelembagaan, dan kesejahteraan manusia secara bersamaan. Sintesis tersebut sekaligus memperkuat argumentasi bahwa kebijakan pemerataan tidak cukup diarahkan pada peningkatan pendapatan, tetapi perlu mencakup pembatasan konsentrasi kekuasaan, perbaikan tata kelola, penguatan perlindungan sosial, dan perluasan kapabilitas masyarakat.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan sosial ekonomi merupakan fenomena yang terbentuk melalui hubungan antara struktur kekuasaan, mekanisme pasar, kapasitas negara, dan kapabilitas individu. Sintesis empat perspektif memberikan penjelasan yang lebih utuh dibandingkan pendekatan yang hanya menggunakan satu teori. Dalam kerangka ini, perspektif Winters menjelaskan bagaimana konsentrasi kekayaan dapat memengaruhi proses pembentukan kebijakan publik, sedangkan Stiglitz menunjukkan bahwa asimetri informasi dan praktik *rent-seeking* berpotensi mengurangi efisiensi serta keadilan mekanisme pasar.

Copyright (c) 2026 Yurisdiksi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora

 <https://doi.org/10.51878/yurisdiksi.v1i2.13769>

Perspektif Sachs melengkapi analisis melalui pentingnya investasi publik dalam memutus perangkap kemiskinan, sementara Sen menekankan bahwa tujuan akhir pembangunan adalah perluasan kapabilitas dan kebebasan substantif masyarakat. Temuan ini sejalan dengan kajian Susanto (2025) yang menegaskan bahwa pembangunan yang berorientasi pada manusia harus menempatkan peningkatan kualitas hidup sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Gunung et al. (2023), Saksti (2026), dan Fauziah et al. (2026) menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, kelembagaan, dan kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya mampu menjamin distribusi kesejahteraan secara merata. Dengan demikian, hasil sintesis penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa ketimpangan merupakan konsekuensi dari interaksi antara kekuasaan politik, struktur ekonomi, dan kapasitas negara dalam mengelola pembangunan secara inklusif.

Temuan tersebut sejalan dengan berbagai penelitian dan laporan internasional terbaru. OECD (2023) menjelaskan bahwa meningkatnya ketimpangan berkaitan erat dengan kualitas tata kelola, distribusi kesempatan ekonomi, dan efektivitas kebijakan publik. Demikian pula, World Bank (2024) menunjukkan bahwa lemahnya institusi serta terbatasnya akses terhadap layanan dasar masih menjadi faktor penting yang memperbesar kesenjangan sosial di berbagai negara berkembang. Behuria dan Sumner (2025) bahkan mengkritik paradigma *middle-income trap* yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan dimensi ideologi dan kualitas kebijakan industri. Sejalan dengan itu, Maruf dan Othman (2025) menegaskan bahwa regulasi memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan, sedangkan Tarigan dan Huda (2025) serta Jannah (2025) menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan publik dan kebijakan sosial sangat menentukan kemampuan negara dalam mengurangi ketimpangan. Kajian Pratama et al. (2019) mengenai politik oligarki di sektor pertambangan juga memberikan bukti bahwa dominasi kelompok elite terhadap proses kebijakan dapat memperlemah fungsi redistributif negara. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa ketimpangan tidak hanya berkaitan dengan distribusi pendapatan, tetapi juga dengan kualitas institusi, tata kelola pemerintahan, dan relasi kekuasaan dalam proses perumusan kebijakan publik.

Pada sektor kesehatan dan pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa komersialisasi layanan dasar berpotensi memperbesar kesenjangan akses apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang menjamin pemerataan layanan publik. Laporan UNDP (2024) dan World Bank (2023) menunjukkan bahwa kualitas tata kelola dan investasi publik merupakan faktor penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Temuan tersebut mendukung pandangan Sachs mengenai pentingnya investasi publik, sekaligus memperkuat argumentasi Sen bahwa keterbatasan akses terhadap layanan dasar akan mengurangi kapabilitas masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Hasil ini juga didukung oleh Zulyanto (2022) yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan instrumen utama dalam pengentasan kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Susanto (2025) menambahkan bahwa pembangunan yang berpusat pada manusia harus menjamin akses yang adil terhadap layanan kesehatan dan pendidikan sebagai fondasi peningkatan kapabilitas masyarakat. Dengan demikian, investasi publik pada sektor layanan dasar tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat modal sosial dan produktivitas ekonomi dalam jangka panjang.

Pembahasan mengenai *gig economy* juga menunjukkan bahwa transformasi digital menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan tenaga kerja. ILO (2021; 2024) melaporkan bahwa pekerja platform digital umumnya menghadapi ketidakpastian pendapatan, perlindungan

sosial yang terbatas, serta lemahnya posisi tawar akibat sistem pengelolaan berbasis algoritma. Kondisi tersebut dapat dipahami melalui perspektif Winters mengenai konsentrasi kepemilikan platform digital dan perspektif Stiglitz mengenai asimetri informasi, sedangkan Sachs menjelaskan bahwa keterbatasan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dapat memperkuat kerentanan ekonomi jangka panjang. Dalam perspektif Sen, kondisi tersebut berimplikasi pada terbatasnya kebebasan masyarakat untuk mengembangkan pilihan hidup yang lebih produktif dan berkelanjutan. Temuan ini konsisten dengan Pilatti et al. (2024) yang menunjukkan bahwa relasi kuasa antara platform digital dan pekerja dipengaruhi oleh algoritma, jaringan sosial, dan rendahnya otonomi pekerja. Penelitian Ranita (2023) menjelaskan bahwa gig economy memang berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional, tetapi masih menyisakan tantangan berupa perlindungan hukum, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial. Hasil tersebut juga diperkuat oleh Wood et al. (2025), Seubert et al. (2025), dan Nanda et al. (2026) yang menegaskan perlunya reformasi regulasi ketenagakerjaan agar transformasi digital tidak semakin memperlebar ketimpangan sosial.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual melalui penyusunan model sintesis yang mengintegrasikan pemikiran Sen, Stiglitz, Winters, dan Sachs ke dalam satu kerangka analisis. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menggunakan satu perspektif teoritis, sintesis yang dikembangkan mampu menjelaskan hubungan antara kapabilitas individu, mekanisme pasar, struktur kekuasaan, dan kebijakan pembangunan sebagai suatu sistem yang saling memengaruhi. Model sintesis tersebut memperlihatkan bahwa kualitas institusi, efektivitas regulasi, distribusi kesempatan ekonomi, dan investasi publik merupakan variabel yang saling berinteraksi dalam membentuk ketimpangan maupun kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pengembangan teori ekonomi-politik dengan menghubungkan dimensi politik, ekonomi, dan pembangunan manusia ke dalam satu kerangka konseptual yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan yang bersifat parsial.

Kontribusi penelitian ini juga memiliki relevansi yang kuat terhadap agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Sorooshian (2024) dan Mishra et al. (2024) menunjukkan bahwa pencapaian SDGs memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, kelembagaan, dan tata kelola secara simultan. Di sisi lain, Pratama et al. (2026) mengingatkan bahwa paradigma pembangunan modern perlu dikritisi agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Firdausiyah dan Sofa (2025) turut menegaskan pentingnya nilai etika, keadilan, dan kepemimpinan dalam pembentukan kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kerangka sintesis yang dikembangkan dalam penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian ekonomi-politik mengenai ketimpangan sosial, tetapi juga dapat menjadi landasan konseptual bagi penyusunan kebijakan publik yang lebih inklusif, adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada pencapaian SDGs secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang mengintegrasikan perspektif Jeffrey Winters, Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, dan Jeffrey D. Sachs, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan sosial dalam masyarakat kontemporer tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konsekuensi dari mekanisme pasar, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai struktur ekonomi-politik yang menciptakan eksklusi sosial secara sistematis. Dominasi oligarki dalam proses pembentukan kebijakan publik memperlihatkan bagaimana kekuatan ekonomi mampu memengaruhi regulasi sehingga fungsi negara sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan mengalami pelemahan. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya praktik *rent-seeking*,

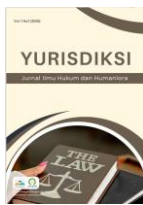
asimetri informasi, dan komersialisasi layanan publik yang pada akhirnya mempersempit akses masyarakat terhadap hak-hak dasar. Novelty penelitian ini terletak pada keberhasilannya membangun suatu model sintesis konseptual yang mengintegrasikan teori oligarki, *rent-seeking*, kapabilitas, dan perangkat kemiskinan ke dalam satu kerangka analitis yang menjelaskan hubungan kausal antara dominasi elite, distorsi regulasi, penurunan kapabilitas manusia, dan reproduksi ketimpangan struktural secara antargenerasi. Model konseptual tersebut memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian ekonomi-politik kesejahteraan dengan menunjukkan bahwa ketimpangan merupakan konsekuensi dari interaksi institusi politik, tata kelola ekonomi, dan kapasitas manusia yang saling memperkuat.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa upaya mengurangi ketimpangan tidak cukup dilakukan melalui kebijakan ekonomi yang bersifat parsial, tetapi memerlukan reformasi kelembagaan yang mampu membatasi dominasi oligarki, memperkuat transparansi regulasi, dan mengembalikan orientasi negara sebagai penyedia kesejahteraan publik yang inklusif. Atas dasar temuan tersebut, reformasi regulasi, penguatan investasi pada layanan dasar, perlindungan hukum bagi pekerja ekonomi digital, serta percepatan pembangunan berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi agenda strategis yang saling melengkapi dalam memutus rantai ketimpangan struktural. Selain memiliki implikasi praktis bagi penyusunan kebijakan publik, model konseptual yang dihasilkan juga membuka peluang pengembangan penelitian selanjutnya melalui pengujian empiris pada berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan ekonomi digital, maupun melalui studi komparatif lintas daerah dan lintas negara untuk menguji validitas serta daya jelaskan model dalam konteks kelembagaan yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya pengembangan teori ekonomi-politik kesejahteraan, tetapi juga menyediakan landasan konseptual bagi perumusan kebijakan publik yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (2026). Dinamika kependudukan dan kesenjangan ekonomi: Kajian literatur tentang ketimpangan, kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. *Journal Health Community Empowerment*, 10(1), 22–29. <https://www.jm.jlikess.com/index.php/hce/article/view/30>
- Ambarwati, A., & Faisal, R. (2026). Pengaruh kebijakan publik terhadap ketimpangan sosial: Perspektif ekonomi politik. *Dasa Darma Journal of Social, Politic, Law, Defense & Security, International & Public Relations and Government Studies*, 1(1), 38–46. <https://ejournal.dasadarma.nawasena.org/article/view/73>
- Behuria, P., & Sumner, A. (2025). Middle-income trap or neoliberal trap?: Industrial policy and ideology in the World Development Report 2024. *Development and Change*. <https://doi.org/10.1111/dech.70013>
- Burger Helmchen, T. (2024). Power and progress—Our thousand-year struggle over technology and prosperity, Daron Acemoglu, Simon Johnson, PublicAffairs, New York, 2023, 560p. *Management International/International Management/Gestión Internacional*, 28(4), 117–120. <https://doi.org/10.59876/a-cjg1-7wnx>
- Dede, F. R. A. (2025). Rekonfigurasi oligarki dan konsolidasi demokrasi: Analisis relasi kekuasaan pasca-Reformasi di Indonesia. *Jurnal Polahi*, 3(3), 166–179. <https://jp.iregway.com/index.php/polahi/article/view/96>
- Fauziah, R., Amelia, V., Almahdali, S. S., Yanti, M. H., & Panorama, M. (2026). Faktor–faktor yang memengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia. *Journal of Citizenship*, 5(2). <https://doi.org/10.37950/joc.v5i2.768>

- Firdausiyah, J., & Sofa, A. R. (2025). Relevansi Al-Qur'an dan hadits dalam pembentukan nilai sosial, etika politik, dan pengambilan keputusan di era kontemporer: Kajian terhadap pengaruhnya dalam kehidupan sosial, kebijakan publik, demokrasi, kepemimpinan, hukum, ekonomi, pendidikan, dan teknologi. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(1), 102–131. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.872>
- Gunung, E. B., Setiawan, D., & Yasin, M. (2023). Menganalisis penyebab, konsekuensi dan solusi potret ketimpangan ekonomi. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(2), 329–339. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v2i2.1688>
- Hickel, J., Sullivan, D., & Zoomkawala, H. (2021). Plunder in the post-colonial era: Quantifying drain from the global South through unequal exchange, 1960–2018. *New Political Economy*, 26(6), 1030–1047. <https://doi.org/10.1080/13563467.2021.1899153>
- Jannah, K. (2025). Peran kebijakan negara dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(12). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/16827>
- Kennedy, P. S. J. (2026). Gig economy dan transformasi kerja digital: Analisis dampak terhadap pekerja dan kebijakan. *Journal of Business & Applied Management*, 19(1). <https://doi.org/10.30813/jbam.v19i1.9837>
- Lestari, N., Alam, N., & Ginova, A. Y. (2024). Strategi kebijakan publik dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 1(3), 264–279. <https://journaldetubuya.com/index.php/jid/article/view/127>
- Maruf, I. R., & Othman, M. K. B. H. (2025). The role of law in national economic development: A literature study on the relationship between regulation and public welfare. *International Journal of Economic Literature*, 3(6), 744–754. <https://sociohum.net/index.php/INJOLE/article/view/91>
- Mishra, M., Desul, S., Santos, C. A. G., Mishra, S. K., Kamal, A. H. M., Goswami, S., ... Baral, K. (2024). A bibliometric analysis of sustainable development goals (SDGs): A review of progress, challenges, and opportunities. *Environment, Development and Sustainability*, 26(5), 11101–11143. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03225-w>
- Naibaho, F. R., Hutahuruk, R., Simanungkalit, P. S., & Tambunan, K. E. (2026). Pengaruh kemiskinan dan ketimpangan pendapatan sebagai hambatan dalam pencapaian SDGs di Indonesia. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 30–43. <https://jurnal.unimor.ac.id/index.php/JEP/article/view/10912>
- Nanda, P., Kumar, V., & Sigue, C. (2026). Gig workers: A comprehensive analysis of global policies. *EDPACS*, 1–14. <https://doi.org/10.1080/07366981.2026.2613529>
- Pilatti, G. R., Pinheiro, F. L., & Montini, A. A. (2024). Systematic literature review on gig economy: Power dynamics, worker autonomy, and the role of social networks. *Administrative Sciences*, 14(10), 267. <https://doi.org/10.3390/admsci14100267>
- Pratama, A. F., Rahmawati, S., & Putra, R. M. (2026). Pembangunan berkelanjutan sebagai proyek sosial: Kritik humaniora terhadap paradigma pembangunan modern. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 19–26. <https://doi.org/10.70716/perseptif.v4i1.459>
- Rani, U., Kumar Dhir, R., Furrer, M., Göbel, N., Moraiti, A., & Cooney, S. (2021). *World employment and social outlook: The role of digital labour platforms in transforming the world of work*. International Labour Organization. <https://www.voced.edu.au/content/ngv:89676>



- Ranita, S. V. (2023). GIG ekonomi: Pemulihan ekonomi nasional dalam pasar kerja Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi* (Vol. 3, pp. 1–5). <https://prosiding.politeknikcendana.ac.id/index.php/sanistek/article/view/341>
- Saksti, H. (2026). Kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia: Analisis sosiologis dan teologis terhadap struktur ketidakadilan. *Jurnal Teologi Pondok Daud*, 9(1). <https://ejournal.sttpk-medan.ac.id/index.php/pondokdaud/article/view/156>
- Sarjito, A. (2023). Efektivitas kebijakan sosial dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan angka kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, 6(2), 1–12. <https://doi.org/10.36624/jisora.v6i2.90>
- Seubert, L., McWha-Hermann, I., Seubert, C., & Searle, R. (2025). Precarious employment and work: Understanding the underlying psychological and social processes and advancing research from work and organisational psychology. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 34(6), 621–627. <https://doi.org/10.1080/1359432X.2025.2565932>
- Sorooshian, S. (2024). The sustainable development goals of the United Nations: A comparative midterm research review. *Journal of Cleaner Production*, 453, 142272. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142272>
- Suhendar, A. (2020). Keterbukaan informasi publik bentuk keseriusan pemerintah menuju good governance: Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 13(2), 243–251. <https://doi.org/10.31845/jwk.v13i2.315>
- Susanto, A. (2025). Pembangunan berorientasi manusia: Suatu analisis terhadap kecenderungan dalam pembangunan nasional. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 15(1), 140–153. <https://doi.org/10.35968/m-pu.v15i1.1400>
- Syata, W. M. (2026). Intervensi yang tepat: Fungsi pemerintah menangani kegagalan pasar. *Journal of Literature Review*, 2(1), 35–43. <https://doi.org/10.63822/mfbejd96>
- Tarigan, A. H., & Huda, K. (2025). Kebijakan publik dan kebijakan sosial dalam ilmu politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(4), 1662–1668. <https://doi.org/10.63822/48ytw906>
- Wati, A. N. C., & Yasa, I. N. M. (2024). Determinan disparitas distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 7239–7254. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12143>
- Wood, A. J., Martindale, N., & Burchell, B. J. (2025). Beyond the “gig economy”: Towards variable experiences of job quality in platform work. *Work, Employment and Society*, 39(5), 1154–1178. <https://doi.org/10.1177/09500170251336947>
- Zulyanto, A. (2022). Pendidikan dan pengentasan kemiskinan dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs). *Convergence: The Journal of Economic Development*, 4(1), 32–40. <https://doi.org/10.33369/convergencejep.v4i1.23385>